

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara menyanggah kedudukan yang sangat fundamental pada kehidupan manusia di dunia karena negara menjadi tempat bagi mereka untuk melanjutkan hidup dan menjalani kehidupan. Oleh karena itu, negara didirikan sebagai sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi manusia untuk berkumpul, menjalankan kehidupan, dan menjaga kelangsungan hidup mereka. Jika dikaitkan dengan teori kenegaraan, kita dapat melihat bahwa negara memiliki fungsi yang bersifat universal, yaitu untuk memenuhi dan mewujudkan kepentingan manusia, terutama masyarakat yang tinggal di dalamnya, agar mereka dapat hidup dengan aman dan melestarikan kehidupannya.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang berarti negara dengan sistem pemerintahan yang didasarkan pada kehendak dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Dalam prinsip ini, rakyat memegang peran yang sangat vital karena kekuasaan tertinggi berada di tangan mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan cara pemilihan pemimpin. Demokrasi di Indonesia tercermin melalui pelaksanaan pemilu yang diadakan setiap lima tahun untuk memilih anggota legislatif serta Presiden dan wakilnya, yang diadakan secara bersamaan di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri. Proses pendemokrasian juga tampak dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang dilakukan serentak.

Untuk menjalankan sistem negara demokrasi, partisipasi politik sangat diperlukan, karena hal ini menjadi ciri khas dari eksistensi modernisasi politik. Berbeda dengan masyarakat tradisional yang umumnya kepemimpinan politiknya lebih banyak ditetapkan oleh otoritas, dalam demokrasi, perolehan kebijakan sangat terpengaruh oleh partisipasi warga negara dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan bangsa.

Pelaksanaan pemilu adalah kegiatan politik dimana menarik perhatian serta melibatkan masyarakat, menjadikannya momen penting untuk pendidikan politik. Melalui pemilu, warga negara diajarkan tentang pentingnya partisipasi dalam memilih. Pemilu memiliki peranan krusial dalam proses demokrasi, karena melalui pemilu terbentuk pemerintahan yang demokratis. Agar pemilu menghasilkan pemerintahan yang adil dan demokratis, penyelenggaraannya harus dilakukan oleh lembaga negara yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia, yang setiap saat mengacu pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan tata tertib. KPU juga memiliki peran penting signifikan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum, agar pelaksanaan dapat kondusif. Kesuksesan pengorganisasian pemilu dapat diukur melalui tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi KPU Kota Malang yang bertujuan untuk mewujudkan KPU yang memiliki integritas, profesionalisme, independensi, transparansi, dan akuntabilitas, untuk mewujudkan demokrasi

Indonesia yang berstandar tinggi pada Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi politik memiliki andil yang sangat besar untuk mencapai kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga pendidikan politik menjadi hal yang penting untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat supaya dapat terlibat dengan optimal dalam kehidupan bernegara. Tingkah laku politik seseorang tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor pendukung di sekitarnya. Di Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, tingkah laku politik seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, psikologis, sejarah, politik, budaya, dan geopolitik yang ada di lingkungan mereka. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perilaku politik individu adalah pendekatan sosial.

Strategi sosiologis, yang juga dikenal sebagai model perilaku memilih Mazhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behaviour), berasumsi bahwa ciri-ciri sosiologis dan perbedaan sosial, seperti usia, jenis kelamin, agama, kelas atau status sosial, pekerjaan, dan latar belakang keluarga, memiliki dampak yang besar terhadap pembentukan perilaku dalam memilih. Kelompok sosial berperan penting untuk membangun perilaku, pemahaman, dan tujuan politik pribadi. Strategi ini berusaha mendalami bagaimana faktor eksternal pada sekitar pemilih mempengaruhi preferensi politik mereka. Sejalan dengan itu, para sosiolog berpendapat bahwa penyebab lingkungan, yaitu kondisi sosial ekonomi, kerjasama, etnisitas, tradisi keluarga, partisipasi

dalam kelompok lain, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal, semuanya turut mempengaruhi perilaku memilih.

Partisipasi politik sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga pendidikan politik menjadi kunci untuk peningkatan pemahaman politik masyarakat supaya mampu terlibat dengan sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Data Survei CSIS (2023), menjelang pemilu 2024, terjadi transformasi kependudukan yang dikenali dengan meningkatnya jumlah pemilih muda (milenial) yang memiliki usia 17 hingga 39 tahun. CSIS memperkirakan bahwa pemilih muda sekitar 60 persen dari total pemilih, yang berarti sekitar 114 juta orang. Penyebab peningkatan akses internet dan pengoprasian media sosial diprediksi akan memengaruhi pilihan politik pemilih muda dan bahkan mengubah perilaku mereka dalam memilih calon presiden dan partai politik.

Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksana pemilihan umum mempunyai kewajiban untuk mengadakan edukasi serta bimbingan politik terhadap warga, supaya mereka mau memanfaatkan hak suara ketika perhitungan suara dilakukan. Kontribusi pemerintahan dalam sistem pemerintahan rakyat menjadi tanda dari pelaksanaan wewenang negara yang dibenarkan warga negara, yang tercermin melalui keikutsertaan mereka dalam proses pemilihan umum. Jumlah keterlibatan politik yang tinggi menunjukkan bahwa warga negara memahami serta berkontribusi dalam program pemerintahan. Pada sisi lain, rendahnya kontribusi politik biasanya

mengindikasikan bahwa rakyat tidak cukup memiliki minat atau perhatian terhadap isu-isu atau kegiatan kenegaraan.

Kontribusi warga terhadap pemilihan umum merupakan bentuk keikutsertaan yang bermaksud menyampaikan dampak pada proses penentuan politik. Kontribusi ini menempatkan masyarakat sebagai orang yang memberikan suara, bukanlah sebagai pejabat politik yang terpilih. Masyarakat, sebagai pemilik kekuasaan, berperan dalam rangkaian politik, yang terlihat dengan partisipasi mereka dalam memberikan hak pilih ketika pemungutan suara dilaksanakan. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu sejatinya merupakan ukuran untuk menilai kualitas kapasitas masyarakat dalam mengubah lambang wewenang menjadi tanda individu mereka. Kontribusi masyarakat pada pemilihan umum pada dasarnya berfokus dalam dua hal: memilih pemimpin serta mendukung keputusan yang diambil kepala pemerintahan. Perilaku politik warga dalam menyuarakan suara adalah wujud kontribusi politik yang paling umum. Namun sisi lainnya, masih terdapat sejumlah masyarakat yang tidak memanfaatkan hak memilih dalam pemilihan umum, yang dikenal sebagai kelompok golput.

Berbagai faktor mempengaruhi kontribusi warga yang memilih, termasuk aspek politik dan prosedural, yang keduanya saling terkait serta saling mendukung. Faktor politik mencakup kinerja kelompok politik, dewan perwakilan, aparat pemerintah, jalannya pemerintahan, serta pengaruh kebijakan yang dapat diamati serta responsi oleh warga negara. Dalam hal ini, pemilihan umum dapat dipandang sebagai periode yang berulang, dimulai pada

periode pemilihan, pemilihan pejabat, berjalannya pemerintahan, lalu kembali ke rangkaian pemilihan berikutnya, di mana pemilih terus melakukan evaluasi terhadap jalannya politik yang ada. Sementara itu, faktor teknis berhubungan langsung dengan periode pemilihan. Badan penyelenggara, pemilihan umum bertanggung jawab untuk mempermudah pemilih agar dapat menyuarakan mereka dengan mudah, terjamin, bebas ancaman, serta dengan cara yang akurat dalam memberikan tanda pada kertas suara. KPU, sebagai pengelola pemilihan umum, memastikan bahwa semua aspek teknis pemilih terpenuhi, dan menjamin bahwa pemilih yang datang ke TPS dapat menyuarakan pilihan dengan baik, serta memastikan suara mereka diakui secara jujur.

Komisi Pemilihan Umum tidak berhubungan langsung dengan performa kelompok politik yang mempengaruhi kontribusi warga. Masalah penyalahgunaan wewenang yang menyangkut aparat daerah, yang menyebabkan ketidakpedulian warga dan rendahnya kontribusi, merupakan faktor yang berada di luar tanggung jawab KPU sebagai pelaksanaan pemilihan umum. Tugas KPU lebih terfokus pada isu kontribusi warga yang disebabkan oleh masalah teknis dalam pelaksanaan pemilihan umum. Jika warga negara yang memilih tidak memanfaatkan hak suara karena keterbatasan informasi tentang tata cara pemilihan suara yang tidak diinformasikan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum, kejadian tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana.

Tidak memilih juga dapat memberikan keuntungan kandidat yang mungkin tidak unggul atau tidak populer. Maksudnya, calon tersebut memiliki

peluang menang hanya dengan jumlah suara yang rendah, karena banyaknya pemilih yang memilih tidak memilih. Hal tersebut bisa mengurangi kekuatan sah kandidat terpilih. Dalam proses pemilihan langsung seperti saat ini, calon yang tidak pasti berkualitas mungkin merasa bahwa dia adalah preferensi pemilih dan tanpa paksaan bertindak sesuai kehendaknya. Pemilu yang dikelola dengan baik dapat menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. Diharapkan, jika pemilu langsung dilaksanakan dengan baik di seluruh Indonesia, ini dapat memperkuat perkembangan demokrasi yang lebih berkualitas dan memperlihatkan karakter Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi secara konkret.

Meskipun pemerintahan memberitahukan bahwa hari pemilu adalah cuti bagi pegawai pemerintah, hal ini tidak berlaku bagi pekerja di sektor perdagangan, yang cenderung tidak mudah untuk ikut serta dalam pemilihan umum karena dampak ekonomi yang ditimbulkan. Banyak calon pemilih menganggap bahwa suara mereka tidak mempengaruhi keadaan atau memperbaiki kualitas hidup ekonomi mereka. Pandangan ini masih terpengaruh oleh keyakinan bahwa keadaan hidup mereka sepatutnya menjadi lebih baik jika mereka berkecimpung dalam dunia politik. Partisipasi warga dalam pemilu masih kurang, sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan tentang pentingnya ikut berpartisipasi, terutama di kalangan masyarakat awam yang minim pengetahuan politik.

KPU Kota Malang yaitu badan independen yang memiliki kewajiban dalam mengatur pelaksanaan pemilu di Kota Malang. Kota Malang sendiri

terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, kurang lebih 90 km berdekatan dengan selatan Surabaya. Daerah perkotaan ini juga merupakan kota terbesar di Indonesia, dan menjadi kota terbesar kedua di Pulau Jawa.

Pemahaman pemerintahan warga yang terlibat langsung dalam pemungutan suara harus terus diperbaiki, sejalan pada tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang bertujuan untuk "Meningkatkan kesadaran politik rakyat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu demi mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis." peran serta kewenangan Komisi Pemilihan Umum pada terlaksananya pemungutan suara tidak hanya terkait dengan lembaga partisipan pemilihan umum, melainkan melibatkan warga dalam peran pemilih yang terlibat langsung. Sehingga, diperlukan riset lanjutan dan penulis ajukan dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih pada Pemilu Tahun 2024."

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam partisipasi politik pemilih pada pemilu tahun 2024”?

1.3 Tujuan Penulis

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi Rencana yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai pengetahuan secara ilmiah serta sebagai pengembangan keilmuan peneliti dalam bidang sosiologi, khususnya tentang strategi peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu. Disamping itu, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kajian ilmu sosiologi politik serta pengembangan teori Fungsional Struktural oleh Talcott Parsons.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian diharapkan mampu memberikan saran atau petunjuk untuk peneliti maupun mahasiswa yang ingin memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang rencana peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu. Sebagaimana kita pahami, kontribusi masyarakat pada pemilihan umum masih minim, sebagian besar dikarenakan kurangnya

pemahaman mereka tentang seberapa esensialnya untuk terlibat, khususnya untuk orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan khusus terhadap pemilu.

- b. Kepada masyarakat, penelitian ini bisa menyuguhkan wawasan mengenai peran penting partisipasi dalam pemilihan umum serta memberikan pemahaman yang mendorong mereka dapat turut serta terlaksana pada pemilu di Kota Malang.
- c. Kepada instansi yang bersangkutan, seperti KPU Kota Malang, penelitian ini bisa berfungsi untuk bahan penilaian dan peningkatan bagi lebih mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu, sehingga target partisipasi yang diharapkan dapat tercapai.

1.5 Definisi Konseptual

Untuk penulis mempermudah dalam menganalisa dan mengkaji hasil penelitian serta menetapkan fokus wawancara, maka diperlukan pemahaman konseptual. Pemahaman konseptual dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Strategi

Sebagaimana yang disampaikan Rosady Ruslan (2005), pada dasarnya strategi merupakan perencanaan dan pengelolaan yang dirancang **untuk** memperoleh target khusus pada praktik operasional. Sementara itu, ahli sosiologi Philip Selznick, seperti yang dikutip oleh Husein Umar (1999), menyatakan strategi yang efektif yaitu strategi yang mencerminkan prinsip-prinsip anggota, supaya merasakan terhubung yang bertujuan untuk organisasi bisa terus memberikan inspirasi. Pada intinya, strategi disusun untuk merespons perubahan eksternal yang relevan bagi suatu lembaga atau

organisasi. Perubahan eksternal ini akan dijawab dengan mempertimbangkan kapasitas internal lembaga atau organisasi untuk memanfaatkan peluang demi meraih manfaat maksimal dengan memaksimalkan keunggulan yang dimiliki (Rahim & Radjab, 2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi didefinisikan sebagai pengetahuan dalam menerapkan kebijakan tertentu atau sebagai perencanaan yang matang terkait aktivitas untuk mencapai tujuan secara spesifik. Strategi juga dipahami sebagai cara untuk meraih tujuan melalui perencanaan jangka panjang yang mencakup aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapainya (Yunus, 2016). Selain itu, strategi juga dapat dipahami sebagai tindakan yang diambil berdasarkan pandangan mengenai apa yang dinantikan di kehidupan mendatang, untuk mempertimbangkan tujuan dan tujuan yang akan diperoleh di masa yang depan (Mulyadi, 2001).

1.5.2 Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan badan independen yang memiliki kewajiban sebagai pelaksana pemilihan umum di Indonesia, yang berskala nasional, konsisten, dan independen, sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilu. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa KPU merupakan institusi yang mengatur penyelenggaraan pemilu dengan sifat nasional, permanen, dan independen. Tugas serta wewenang KPU pada pelaksanaan pemilu tidak hanya terkait dengan partai-partai peserta pemilu, namun juga melibatkan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu. KPU adalah suatu

lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya. Ketentuan yang melahirkan komisi pemilihan umum (KPU) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPUP).

1.5.3 Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwasannya Pemilihan umum merupakan fasilitas bagi masyarakat yang diselenggarakan tanpa perantara, terbuka, merdeka, tertutup, terbuka, dan bijaksana di Negara Republik Indonesia, atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemilu, perubahan golongan teratas wewenang dapat dilakukan dengan cara lebih adil, dikarenakan warga negara memiliki hak pribadi untuk menetapkan siapa yang masih mempunyai persyaratan sebagai golongan teratas dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung, ini juga berarti pemilu berfungsi sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap penguasa, untuk menilai apakah penguasa tersebut masih dipercaya atau tidak.

1.5.4 Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiarto, partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai tindakan individu atau kelompok dalam memilih pemimpin Negara, serta secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Konsep partisipasi politik dalam Negara demokratis berlandaskan pada prinsip bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui aktivitas untuk menentukan masa depan bersama. Jenis

partisipasi politik antara lain yaitu berpartisipasi dalam pemilu, menghadiri pertemuan umum, menjadi anggota partai (Cholisin 2007:150).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan Bogdan dan Taylor (1975) yang diacu oleh Moleong (2007), metode kualitatif merupakan langkah penelitian yang menyediakan data sebagai catatan observasi tercatat atau lisan dari aktor lembaga serta tindakan yang dapat disaksikan. Jenis penelitian yang diterapkan yaitu studi kasus, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang aktor lembaga terkait dengan kondisi dan fenomena yang berlangsung (Koentjaraningrat, 1993). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggali kondisi yang dialami oleh objek penelitian, seperti tingkah laku, pandangan, dorongan, dan tindakan, secara menyeluruh, dengan menyajikan penjelasan dalam bentuk narasi dan bahasa, dalam situasi alami tertentu, serta menggunakan beragam penelitian ilmiah (Moleong, 2007).

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti merasa bahwa masalah yang diteliti cukup kompleksitas dan dinamika cukup tinggi. Oleh karena itu, data yang didapat tersebut diperoleh dengan cara yang lebih natural yakni observasi dan wawancara langsung dengan sumber informasi maka diperoleh respon yang natural. Disamping itu, peneliti bermaksud untuk mengerti keadaan masyarakat dengan rinci, mencari pola, asumsi, dan konsep yang sesuai dengan data yang diperoleh

di tempat kejadian. Penelitian ini berfokus pada rencana KPU Kota Malang untuk memperkuat keterlibatan politik warga pada Pemilu 2024.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kajian dengan metode kualitatif yang memakai jenis studi kasus. Penelitian ini fokus secara mendalam pada sasaran spesifik yang meneliti dalam kapasitas sebuah masalah.

W. Lawrence Neuman (2001) dalam bukunya *Social Research methods: Qualitatif and Quantitative* bahwa studi kasus mengkaji sejumlah aspek tentang sejumlah permasalahan. Permasalahan bisa dalam bentuk pribadi, golongan, lembaga, aksi, kejadian, atau geografis satuan. Informasi kasusnya detail, variatif, dan luas. Hampir semua permasalahan silang (atau penelitian nonkasus) bersifat kuantitatif. Jadi Studi kasus merupakan metode yang melacak atau yang melakukan infestigasi berdasarkan rumusan kasuistik. (Neuman, 2013)

Selain itu, studi kasus menawarkan bukti yang lebih efektif untuk menggambarkan peristiwa atau situasi serta proses kompleks yang melibatkan berbagai factor yang berlangsung seiring waktu dan ruang. Penelitian studi kasus juga dapat mengintegrasikan seluruh situasi dan berbagai perspektif di dalamnya. Penelitian studi kasus memiliki enam hal berikut :

1. Keabsahan konseptual.

Studi kasus berperan dalam “mengungkap” dan mengidentifikasi konsep atau variabel yang paling penting, serta bergerak menuju inti esensial pada konsep yang lebih filosofis.

2. Dampak heuristik.

Studi kasus memiliki tingkat heuristik yang tinggi (yaitu, menyamakan pengajaran selanjutnya, hasil pencarian, atau solusi untuk permasalahan). Studi ini membantu dalam membangun teori baru, mengembangkan atau memperluas konsep, serta mengeksplorasi diantara ide-ide yang saling berhubungan.

3. Identifikasi mekanisme sebab akibat.

Studi kasus mampu menunjukkan secara rinci proses social dan mekanisme di mana satu factor memengaruhi faktor lainnya.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada wilayah di mana pengkaji menggambarkan kejadian nyata dari objek atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Malang, Jawa Timur, khususnya di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang terletak di Jalan Bantaran No 6 Malang. Pemilihan lokasi ini relevan dengan topik penelitian yang diambil, karena di tempat tersebut peneliti dapat mengakses berbagai data yang diperlukan untuk penelitian.

1.6.4 Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Pemilihan subjek pada penelitian ini, pemilihan responden dilakukan dengan cara terarah dengan cara pengambilan sampel, yaitu peneliti memilih subjek secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa

subjek tersebut memiliki pengetahuan dan kapasitas yang relevan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2017). Subjek yang dipilih dipercaya menguasai wawasan yang luas mengenai informasi dan persoalan yang dikaji, dan mampu diandalkan sebagai rujukan informasi. Subjek dalam penelitian ini ditentukan sendiri oleh peneliti dan ada kriterianya, yaitu :

1. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang dianggap mampu dan dapat memberikan informasi terkait rencana KPU Kota Malang untuk memperkuat keterlibatan warga dalam pemilu 2024.
2. Kasubbag Teknis dan Hupmas yang dianggap mampu dan dapat memberikan informasi terkait untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Malang.
3. Dua Informan pada 5 Kecamatan di Kota Malang yang dianggap mampu meberikan informasi dan kebenaran tentang program KPU dalam meningkatkan partisipasi politik.

1.6.5 Sumber Data

Dua sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu :

1.6.6.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari responden di tempat penelitian. Dalam studi ini, data primer dikumpulkan dengan tanya jawab dan pengamatan yang dilakukan terhadap responden yang dipilih.

1.6.6.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak langsung, biasanya melalui prosedur perolehan data yang mendukung data primer. Pada pengkajian ini, peneliti memanfaatkan berbagai referensi data seperti publikasi ilmiah, literatur, kajian sebelumnya, serta makalah dari situs web yang relevan mengenai topik yang dibahas pada riset ini.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan informasi atau teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat penting pada penelitian, dikarenakan tujuan utama penelitian yaitu untuk memperoleh informasi. Apabila peneliti tidak memahami metode perolehan data, sehingga data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan penentuan standar. Pada riset ini, peneliti menerapkan metode perolehan informasi sebagai berikut: (Sugiyono, 2016)

1.6.6.1 Observasi

Berdasarkan (Sugiyono, 2018), observasi dalam metode pengambilan informasi memiliki karakteristik yang membedakannya dalam metode berbeda seperti tanya jawab serta kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner secara konsisten melibatkan komunikasi dengan pihak terkait, observasi tidak hanya dibatasi oleh manusia, namun sekaligus pada objek lainnya.

Dalam kajian ini, peneliti akan menjalankan observasi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Peneliti akan mengamati rencana KPU Kota Malang untuk memperbaiki keterlibatan politik masyarakat pada Pemilihan umum 2024 dan juga

akan meminta data pemilu sebelumnya. Proses observasi ini dilakukan untuk mendekatkan peneliti dengan subjek penelitian serta menggali informasi di lokasi tersebut. Agar subjek tidak terganggu selama proses penelitian, peneliti akan terlebih dahulu mendiskusikan beberapa hal, seperti lokasi pengambilan informasi, batasan-batasan selama pengambilan informasi, serta waktu dan jadwal yang tepat untuk pengumpulan data.

1.6.6.2 Dokumentasi

Metode perolehan informasi dengan catatan meliputi beragam jenis misalnya karya tulis, ilustrasi, maupun karya seni. Hasil pengamatan atau wawancara yang dilaksanakan semakin diyakini apabila diperkuat oleh dokumentasi yang tercatat sepanjang tahapan perolehan informasi. Catatan ini dapat berupa gambar, video, atau perekaman suara yang dihasilkan selama prosedur perolehan informasi (Sugiyono, 2016)

Data dokumentasi ini sangat penting bagi pengkaji demi menyempurnakan informasi yang didapat dari tanya jawab, seperti tulisan arsip resmi, laporan studi, serta dokumen yang mampu memperkaya hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu dokumentasi didapatkan dari hasil pengambilan gambar, video, dan perekaman suara. Mengenai riset ini peneliti akan mengajukan pertanyaan persetujuan responden sebelum menjalankan tahapan dokumentasi, jika responden tidak bersedia oleh karenanya peneliti

akan menghormati serta selalu melindungi kebebasan pribadi responden.

1.6.6.3 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada partisipan. Target dari wawancara ini adalah supaya responden merasa lebih nyaman sewaktu tahapan penggalian data serta kendala yang ada bisa transparan, sehingga responden dapat lebih bebas menyampaikan pemikirannya (Sugiyono, 2016).

Sebelum interview dilakukan, peneliti menyusun rangkaian permintaan informasi yang akan diajukan untuk subjek pengkajian. Wawancara ini dilakukan dengan anggota KPU Kota Malang. Wawancara menjadi metode utama untuk memperoleh informasi yang akurat, di mana peneliti akan menggali berbagai kebenaran yang dimengerti subjek. Pengkaji yang nantinya menanyakan berbagai hal misalnya strategi apa saja yang dijalankan dari KPU Kota Malang guna meningkatkan keterlibatan politik masyarakat dalam Pemilu 2024, serta kendala atau hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Malang dalam upaya tersebut, dan lain-lain. Pada tahapan wawancara ini dijalankan dengan cara tidak resmi, komunikatif, dan melalui pertanyaan serta tanggapan secara jelas. Pertanyaan yang disusun tidak wajib disampaikan secara tersusun dikarenakan tanya jawab akan dilaksanakan secara natural sesuai dengan reaksi oleh narasumber.

1.6.7 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan tahapan rancangan dan pengorganisasian informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dalam kategori tertentu, menguraikan ke dalam komponen-komponen, serta menyusunnya pada struktur yang sudah ditentukan. Selanjutnya, peneliti mengambil informasi yang relevan untuk ditindaklanjuti dan menarik kesimpulan supaya informasi yang ada bisa lebih jelas (Sugiyono, 2016).

Menurut Miles dan Huberman, analisis data mencakup tiga tahap penting yang dikerjakan secara serentak, yaitu penyederhanaan data, presentasi data, dan pembuatan kesimpulan atau validasi. Ketiga langkah ini saling terhubung dan membentuk suatu proses yang berkelanjutan, yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data. Proses ini membentuk wawasan yang lebih luas yang disebut sebagai "analisis" (Ulber Silalahi, 2009: 339). Pada kajian kualitatif, metode analisis data meliputi berbagai langkah, seperti transkripsi hasil wawancara, penyederhanaan data, pemeriksaan, penguraian data, serta perbandingan data. Berikut merupakan metode analisis data yang diterapkan oleh peneliti:

1.6.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan seleksi, fokus pada penyederhanaan, penyederhanaan, dan pengolahan data mentah yang diperoleh melalui dokumentasi lapangan. Tahap ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proyek penelitian kualitatif, atau selama pengumpulan data. Tahapan dalam reduksi data meliputi

pembuatan ringkasan, pengkodean, pelacakan, serta menyampaikan pesan tertulis.

Reduksi data yaitu bagian dari pemeriksaan yang bertujuan untuk memperjelas dalam pengarahannya fokus pada data secara relevan, melalui cara mengelompokkan data sehingga akhirnya kesimpulan yang diperoleh bisa diuktikan. Pada studi kualitatif, data bisa dipermudah dengan beberapa teknik, seperti dengan abstraksi, deskripsi ringkas, atau pengelompokan dalam format yang lebih sederhana.

1.6.7.2 Menarik Kesimpulan

Selama proses penggalian informasi, peneliti menyusun analisis dengan menggali makna, menyusun pola, uraian, serta pernyataan. Hasil yang sebelumnya tidak pasti akan semakin detail seiring dengan banyaknya data yang terkumpul di lapangan.

1.6.8 Teknik Keabsahan Data

Ketepatan atau keabsahan data dikerjakan untuk menjamin bahwa riset yang dilakukan sesuai dengan kriteria ilmiah serta untuk memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Triangulasi dapat dikerjakan dengan metode mencocokkan informasi yang ada pada sumber lain, seperti jurnal penelitian (sumber data sekunder). Menurut L. Moleong (2015), triangulasi sumber dapat dilakukan melalui teknik *member check*.

Pada penelitian ini, perbandingan sumber diterapkan untuk memeriksa ketepatan data menggunakan metode memverifikasi data yang

sudah terkumpul dari berbagai referensi (Sugiyono, 2007). Tujuan ini diterapkan supaya lebih dipahami tentang strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk memajukan keterlibatan politik penduduk.

